

Johan Rosihan: Komoditas Ikan Sebagai Alternatif Pangan Harus Murah dan Tersedia

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Apr 6, 2022 - 12:39



Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2022).

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk juga menjamin stabilitas harga komoditas ikan, bukan hanya stoknya. Sehingga di tengah kenaikan harga komoditas lauk-pauk saat ini, komoditas ikan dapat menjadi alternatif pangan murah dan tersedia

bagi masyarakat.

“Pesan kami, tolong jaga harga ikan ini. Agar tersedia dan terjangkau kita harus menjadikan komoditas ikan ini sebagai alternatif pangan yang murah dan tersedia buat rakyat ketika komoditas-komoditas pangan lain mengalami fluktuasi harga dan kelangkaan yang tidak menentu,” ujar Johan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2022).

Dalam paparan koordinasi antisipasi kebutuhan pasokan ikan saat Ramadan dan menjelang Lebaran 1443 H, jajaran KKP menjelaskan stok ikan per 28 Maret 2022 sebesar 519 ton. Kemudian dalam tabel prognosa ketersediaan ikan, jumlah kebutuhan ikan untuk bulan April dan Mei 2022 adalah sebanyak 2,64 ton dan jumlah ketersediaan sebanyak 2,99 ton.

Melihat perkiraan jumlah kebutuhan ikan sebanyak 2,64 ton dan target ketersediaan 2,99 ton ini, Johan ingin ada jaminan dari KKP. “Artinya bahwa target tangkap, target budidaya itu harus bisa kita genjot untuk memastikan bahwa angka 2,9 itu bisa dipenuhi. Sehingga kita tidak kekurangan ikan untuk puasa dan lebaran ini,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Melihat jumlah perairan Indonesia yang luas, Ikan diharapkan dapat menjadi pangan alternatif bagi masyarakat karena nilai gizinya yang tinggi. “Jadikan komoditas ini sebagai alternatif penyediaan pangan yang murah buat masyarakat untuk memenuhi gizi dan protein,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (gal/sf)